Volume 1 Issue 1 Oktober Tahun 2026
PROSIDING STAI PANCA BUDI
E-ISSN: XXXX-XXXX

STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS PESANTREN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT: STUDI KUALITATIF DI MTS AL-JAWAHIR SAMPANG

Ikrimah[1], Iklimatil Udhiyah[2], Hilyatun Najah[3]
Universitas Islam Negeri Madura[1,2,3]
24381042038@student.iainmadura.ac.id[1], 24381042040@student.iainmadura.ac.id[2],
24381042041@student.iainmadura.ac.id[3]

Abstrak

Manajemen keuangan merupakan instrumen krusial dalam menunjang keberlanjutan dan mutu lembaga pendidikan Islam swasta berbasis pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan keuangan di MTs Al-Jawahir Komis, Kedungdung, Sampang, Jawa Timur, yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Asy'ari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap dokumen profil madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTs Al-Jawahir mengintegrasikan empat tahapan utama manajemen keuangan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban) dengan nilai-nilai internal pesantren seperti amanah, kejujuran, dan kemaslahatan bersama. Meskipun memiliki keterbatasan dalam transparansi digital penuh, kepercayaan masyarakat (*public trust*) tetap terjaga tinggi karena kuatnya legitimasi kultural pesantren yang berdiri sejak tahun 1835. Strategi diversifikasi pendanaan dilakukan melalui pemanfaatan Dana BOS, kontribusi swadaya, serta integrasi unit usaha ekonomi pesantren untuk mengatasi hambatan finansial siswa kurang mampu.

Kata Kunci: ***Manajemen Keuangan, Lembaga Pendidikan Islam, Mutu Pendidikan, Pesantren, MTs Al-Jawahir.***

PENDAHULUAN

Eksistensi lembaga pendidikan Islam swasta di Indonesia, khususnya Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berbasis pesantren, dihadapkan pada tantangan pengelolaan pembiayaan yang semakin kompleks di era modernisasi pendidikan saat ini. Lembaga pendidikan bukan lagi sekadar pusat transfer pengetahuan, melainkan institusi formal yang dituntut memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), di mana salah satu pilar utamanya adalah standar pembiayaan. Keuangan merupakan komponen yang paling vital, sensitif, sekaligus strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap dinamika akademis, pengadaan fasilitas, hingga kesejahteraan sumber daya manusia sangat bergantung pada bagaimana arus modal dikelola secara manajerial.

Setiap lembaga pendidikan memerlukan tata kelola keuangan yang terstruktur, sistematis, dan bersih agar seluruh instrumen akademis serta non-akademis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang teratur tidak hanya membantu madrasah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan buku teks pembelajaran, melainkan juga menyokong optimalisasi proses pembelajaran yang inovatif serta peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Di tengah keterbatasan subsidi penuh dari pemerintah terhadap sektor swasta, madrasah dituntut memiliki kemandirian finansial yang kokoh agar tidak mengalami stagnasi operasional.

Dalam konteks manajemen madrasah kontemporer, pengelolaan dana tidak sekadar bermakna pencatatan mekanis arus kas masuk dan keluar atau pembukuan konvensional. Lebih dari itu, ia melibatkan siklus manajerial yang komprehensif yang meliputi perencanaan

anggaran (*planning*), pelaksanaan alokasi (*executing*), pengawasan internal maupun eksternal (*controlling*), dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban (*accounting*). Keberhasilan mengimplementasikan siklus ini secara profesional akan berkolerasi positif pada ketercapaian tujuan institusional serta peningkatan akreditasi lembaga (Mulyasa, 2017: 48). Sebaliknya, tata kelola yang buruk berpotensi besar menghambat roda organisasi, menciptakan konflik internal, dan mendegradasi kualitas madrasah di mata publik (Matin, 2017: 21).

MTs Al-Jawahir yang terletak di Jl. Raya Kedungdung, Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, merupakan representasi madrasah swasta berakreditasi B yang memiliki karakteristik sosiologis dan geografis yang sangat unik. Madrasah ini berada langsung di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Komis, sebuah entitas pendidikan Islam historis di Pulau Madura yang telah eksis sejak zaman kolonial, tepatnya didirikan pada tahun 1835. Dengan jumlah peserta didik aktif yang mencapai 252 siswa, madrasah ini memikul tanggung jawab moral dan intelektual yang besar untuk mengintegrasikan kurikulum keagamaan khas pesantren (kitab kuning) dan kurikulum nasional secara terpadu melalui program unggulan pembinaan karakter Islami.

Sebagai lembaga pendidikan swasta di wilayah rural Kabupaten Sampang, Madura, MTs Al-Jawahir dihadapkan pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat sekitar yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, buruh migran, atau pelaku usaha mikro dengan tingkat pendapatan yang fluktuatif. Kondisi ini menuntut madrasah untuk bersikap adaptif, fleksibel, namun tetap profesional dalam memformulasikan kebijakan pembiayaan pendidikan. Di satu sisi, madrasah harus menjaga agar biaya pendidikan tetap terjangkau oleh masyarakat lokal agar tidak memicu angka putus sekolah; di sisi lain, madrasah membutuhkan dana segar yang kontinu untuk membiayai operasional, merawat fasilitas, dan meningkatkan mutu pembelajaran.

Oleh karena itu, tata nilai Islam yang bersumber dari tradisi kepesantrenan seperti prinsip *amanah*, kejujuran (*shiddiq*), keterbukaan (*tabligh*), dan kebijaksanaan (*fathanah*) menjadi fondasi teologis utama dalam operasionalisasi roda keuangan di MTs Al-Jawahir Sampang (Musfah, 2018: 223). Pengelolaan anggaran tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab administratif-formal kepada pemerintah atau yayasan, melainkan dihayati sebagai bentuk pertanggungjawaban transendental (vertikal) kepada Allah SWT. Harmonisasi antara sistem manajemen modern dan kearifan kultural pesantren inilah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti secara mendalam.

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif mengenai bagaimana strategi manajemen keuangan yang diterapkan oleh MTs Al-Jawahir Sampang. Fokus utama analisis diletakkan pada mekanisme penyusunan anggaran, teknik diversifikasi sumber dana alternatif, implementasi prinsip akuntabilitas di tengah keterbatasan teknologi digital di wilayah rural, serta dampaknya terhadap eksistensi mutu pendidikan dan tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*) yang tetap terjaga tinggi selama lintas generasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif (Moleong, 2019: 6). Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin menangkap fenomena secara utuh, alamiah, dan mendalam mengenai strategi, tindakan, hambatan, serta nilai-nilai yang melandasi tata kelola keuangan di MTs AlJawahir Sampang. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi empiris yang mendalam terhadap suatu gejala kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan jelas.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data dokumentasi primer dan literatur sekunder. Data primer bersumber langsung dari dokumen Profil Madrasah Tsanawiyah Al-Jawahir (NPSN: 20583215) yang terindeks resmi pada Data

Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia. Data profil tersebut mencakup identitas fisik madrasah, status akreditasi (B), data kepemimpinan, data jumlah peserta didik (252 siswa), serta data spasial-geografis di mana madrasah terletak pada titik koordinat
Lintang: -7.1075 dan Berbujur: 113.2458, tepatnya di kawasan rural Kecamatan Kedungdung. Dokumen silsilah historis dan profil Pondok Pesantren Al-Asy'ari Komis yang didirikan tahun 1835 juga dijadikan landasan kontekstual yang mendasar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode trianggulasi dokumen dan literatur ilmiah (*library research*). Peneliti mengumpulkan, menelaah, dan memadukan data identitas fisik serta operasional MTs Al-Jawahir dengan teori-teori manajemen pembiayaan pendidikan Islam, regulasi pengelolaan Dana BOS Kementerian Agama, serta jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan akuntabilitas keuangan lembaga keagamaan. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tiga tahapan sesuai model Miles dan Huberman, yaitu: (1) reduksi data, dengan merangkum dan memilah data profil madrasah serta teks literatur yang esensial; (2) penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi deskriptif analitis dan bagan siklus; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi data secara kritis untuk menghasilkan temuan penelitian yang sahih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Struktur Anggaran dan Pembiayaan di MTs Al-Jawahir Sampang

Keuangan di dalam ekosistem satuan pendidikan Islam swasta dipahami sebagai daya dukung material utama yang dialokasikan secara sadar untuk menunjang ketercapaian visi, misi, dan mutu akademik lembaga (Minarti, 2016). Berdasarkan dokumen profil satuan pendidikan, MTs Al-Jawahir Sampang secara konsisten mengarahkan kebijakan anggarannya demi merealisasikan visi utama madrasah, yaitu: *"Menghasilkan peserta didik yang berakhlakul karimah, berilmu, dan mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari"*. Konsekuensi dari visi tersebut menuntut draf anggaran belanja madrasah berfokus pada dua dimensi secara seimbang: penguatan kapasitas keagamaan (karakter kepesantrenan) dan peningkatan standar akademik nasional.

Sebagai madrasah swasta yang secara struktural dan kultural bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Komis—sebuah institusi pesantren salaf-modern bersejarah yang didirikan sejak tahun 1835—konstruksi pembiayaannya bersifat integratif-kolektif. Karakteristik ini membedakannya dengan sekolah negeri yang mengandalkan APBN penuh. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat tiga pilar utama yang membentuk struktur pendapatan anggaran di MTs Al-Jawahir Sampang,
antara lain:

1. **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):** Pendanaan ini merupakan pilar utama pembiayaan operasional non-personalia madrasah yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Agama RI. Dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar dalam sistem Emis (dalam kasus ini sebanyak 252 siswa). Dana ini dialokasikan secara ketat untuk mendanai komponen-komponen wajib seperti pengadaan buku pegangan santri, langganan daya dan jasa internet sekolah, pemeliharaan sarana fisik gedung ruang kelas, pelaksanaan asesmen madrasah, hingga pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler wajib.
2. **Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) / Iuran Swadaya Santri:** Kontribusi dana ini bersumber dari wali murid yang dikumpulkan secara berkala melalui komite madrasah. Mengingat letak geografis madrasah yang berada di wilayah rural (Kecamatan Kedungdung, Sampang), nominal iuran ini ditentukan secara demokratis melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan ekonomi riil masyarakat lokal. Iuran swadaya ini berfungsi sebagai dana taktis fleksibel untuk

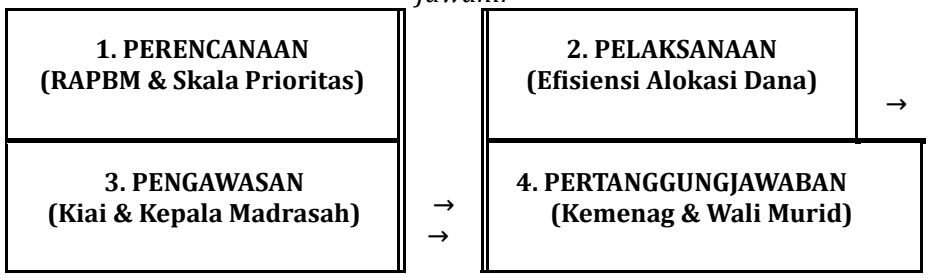
membiayai komponen operasional madrasah yang tidak dapat dicover oleh regulasi Dana BOS.

3. **Subsidi Silang Kultural dan Filantropi Pesantren:** Pilar ketiga ini merupakan keunggulan komparatif MTs Al-Jawahir sebagai sekolah berbasis pesantren. Yayasan Pondok Pesantren Al-Asy'ari secara rutin mengalokasikan bantuan dana penunjang yang dihimpun dari hasil pengelolaan filantropi Islam (Zakat, Infak, Sedekah) dari para alumni, simpatisan, masyarakat umum, serta optimalisasi sisa hasil usaha (SHU) unit-unit ekonomi mandiri yang dikelola oleh pesantren (seperti koperasi santri dan usaha pertanian).

B. Implementasi Siklus Manajemen Keuangan di MTs Al-Jawahir

Aktivitas tata kelola keuangan di MTs Al-Jawahir Sampang tidak berjalan secara acak, melainkan dioperasionalkan melalui siklus manajerial formal yang mengadopsi empat tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Mulyasa, 2017: 48). Keempat tahapan ini dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun anggaran guna menjamin efektivitas serapan dana.

Gambar 1. Siklus Tata Kelola Keuangan Terpadu Berbasis Teo-Manajerial di MTs Al-Jawahir



1. Tahap Perencanaan Anggaran (Planning)

Siklus tahunan diawali dengan pelaksanaan rapat pleno penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Proses ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Madrasah, Slamet Riadi, A.Ma., dengan melibatkan bendahara madrasah, perwakilan dewan guru, komite sekolah, serta perwakilan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Asy'ari. Dalam forum ini, seluruh rencana pengeluaran didebat dan diuji berdasarkan asas urgensi dan dampaknya terhadap mutu proses pembelajaran siswa. Skala prioritas disusun secara cermat; misalnya, mengutamakan pembiayaan program keagamaan terpadu, penyediaan kuota internet untuk menunjang ujian digital, serta honorarium tenaga pendidik hononer. Penyusunan skala prioritas yang matang ini sangat esensial guna mengantisipasi risiko defisit anggaran di tengah keterbatasan modal madrasah.

2. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Executing)

Setelah RAPBM disahkan bersama, tahap pelaksanaan pembelanjaan dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip transparansi administratif dan efisiensi nominal.
Mekanisme pengeluaran dana diklasifikasikan ke dalam dua pintu utama: untuk Dana BOS, realisasi pembelanjaan diinput dan dipantau secara ketat melalui sistem aplikasi e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik) yang terhubung langsung ke Kementerian Agama RI guna memastikan tidak adanya tumpang tindih anggaran. Sementara itu, untuk dana yang bersumber dari swadaya masyarakat lokal, penggunaannya dikelola secara manual-akuntabel oleh bendahara internal madrasah untuk mendanai insentif guru, pembiayaan konsumsi kegiatan keagamaan, serta pemberian santunan sosial bagi siswa yang sakit.

3. Tahap Pengawasan Anggaran (Controlling)

Sistem pengendalian internal dan pengawasan anggaran di MTs Al-Jawahir Sampang menerapkan model pengawasan berlapis (*dual-control system*). Pengawasan pertama bersifat

formal-manajerial yang dilakukan oleh Slamet Riadi, A.Ma., selaku Kepala Madrasah melalui pemeriksaan buku kas umum (BKU) bendahara setiap akhir bulan. Pengawasan kedua—yang menjadi ciri khas lembaga pesantren—adalah pengawasan eksternal-kultural-spiritual yang dilakukan secara langsung oleh Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Asy'ari. Para tokoh kiai melakukan monitoring kultural untuk memastikan bahwa setiap sen uang yang masuk ke madrasah benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan santri (umat) dan terbebas dari segala bentuk penyelewengan moral (korupsi/manipulasi).

4. Tahap Pertanggungjawaban (Accounting)

Akuntabilitas akhir diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan secara berkala. Dokumen LPJ Dana BOS disusun secara digital lengkap dengan bukti-bukti nota keuangan yang valid, kemudian diserahkan secara berkala ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang sebagai syarat mutlak pencairan dana tahap berikutnya. Di sisi lain, pertanggungjawaban moral kepada masyarakat dan yayasan diwujudkan melalui laporan tertulis yang disampaikan secara transparan dalam rapat koordinasi tahunan bersama wali murid, komite madrasah, dan dewan pengasuh yayasan.

C. Transparansi, Akuntabilitas, dan Legitimasi Kultural Pesantren Sejak 1835

Keberhasilan tata kelola keuangan di MTs Al-Jawahir Sampang memberikan sebuah potret teoritis yang menarik mengenai bagaimana sebuah lembaga pendidikan mampu mempertahankan eksistensinya tanpa harus bergantung pada kecanggihan
teknologi digital mutakhir. Di era digital saat ini, arus utama literatur manajemen selalu menekankan bahwa transparansi wajib ditopang oleh platform digital seperti situs web sekolah interaktif atau aplikasi pelaporan berbasis awan (Sari & Sunhaji, 2026). Namun, di MTs Al-Jawahir yang terletak di area rural Madura, pemanfaatan instrumen digital penuh masih diimplementasikan secara bertahap dan terbatas akibat kendala teknis dan kapasitas SDM lokal.

Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap madrasah ini tetap berada pada level yang sangat tinggi. Fenomena sosiologis ini dapat dijelaskan melalui teori legitimasi kultural dan teologis Islam (Qomar, 2015). Kepercayaan masyarakat Sampang terhadap MTs AlJawahir tidak diukur dari seberapa canggih sistem akuntansi digital yang dipamerkan, melainkan didasarkan pada reputasi historis, integritas moral, serta nilai *amanah* yang melekat erat pada figur kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Asy'ari yang telah mengakar di sanubari masyarakat Madura sejak tahun 1835 (Fauzi, 2021).

Masyarakat memiliki keyakinan spiritual yang kuat (*husnudzon*) bahwa dana SPP atau sumbangan sukarela yang mereka titipkan kepada pihak madrasah akan dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab demi meraih keberkahan ilmu anak-anak mereka. Ketidakpastian finansial atau keterbatasan transparansi digital disubstitusi secara sempurna oleh keterbukaan sosiologis melalui forum tatap muka langsung
(*muwajahah*) yang diadakan secara berkala antara kepala madrasah, kiai pengasuh, dan para wali murid. Dalam forum tatap muka tersebut, segala bentuk kendala finansial madrasah dibahas secara kekeluargaan, sehingga menutup celah kecurigaan publik (Rahayu & Weny, 2026).

D. Analisis Strategis Pengelolaan Filantropi Islam: Jaring Pengaman Finansial Rural

Sebagai instrumen analisis kritis untuk memetakan kekuatan dan kelemahan strategi manajemen keuangan yang diterapkan oleh MTs Al-Jawahir Sampang, berikut disajikan matriks analisis teo-manajerial berdasarkan hasil sintesis data lapangan dengan teori pembiayaan pendidikan Islam (Matin, 2017; Sagala, 2017):

Kekuatan (Strengths) & Peluang (Opportunities)	Kelemahan (Weaknesses) & Tantangan (Threats)
1. Legitimasi Historis Sejak 1835: Dukungan penuh dari Pondok Pesantren AlAsy'ari melahirkan tingkat kepercayaan publik yang masif tanpa biaya pemasaran. **2. Sumber Dana Wakaf Lahan:** Seluruh area fisik bangunan madrasah berdiri di atas tanah wakaf abadi, mengeliminasi beban biaya sewa. **3. Jaringan Alumni Luas:** Potensi donasi taktis dari komunitas alumni lintas generasi sebagai sumber dana alternatif nonpemerintah.	**1. Keterbatasan Transparansi Digital:** Pelaporan keuangan berbasis teknologi belum merata, berisiko pada keterlambatan adaptasi regulasi pusat. **2. Ketergantungan pada Dana BOS:** Operasional utama akademik masih sangat sensitif terhadap regulasi dan waktu pencairan Dana BOS pemerintah. **3. Fluktuasi Pendapatan Wali Murid:** Kondisi ekonomi masyarakat rural yang tidak menentu berpotensi memicu tunggakan iuran swadaya.

Salah satu langkah taktis paling menonjol yang berhasil diterapkan oleh manajemen keuangan MTs Al-Jawahir dalam mengatasi kelemahan sosiokultural di atas adalah optimalisasi instrumen filantropi Islam, khususnya pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikombinasikan dengan sistem subsidi silang (Aryana, 2021). Dana filantropi yang masuk melalui pintu yayasan pesantren tidak dicampuradukkan ke dalam kas operasional sekolah, melainkan difungsikan sebagai 'jaring pengaman sosial' bagi para peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau yatim piatu.

Melalui kebijakan proteksi finansial ini, siswa yang mengalami kesulitan finansial dibebaskan dari kewajiban membayar iuran komite madrasah, di mana beban biaya tersebut ditanggung sepenuhnya oleh alokasi dana zakat mal yayasan atau disubsidi oleh wali murid yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi (subsidi silang). Kebijakan inklusif ini terbukti sangat efektif dalam menekan angka putus sekolah (*drop out*) di Desa Komis, Sampang, sekaligus menjadi bukti riil bahwa tata kelola keuangan madrasah berbasis nilai pesantren mampu menghadirkan keadilan sosial dan mutu pelayanan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Wijayanti,
2024).

SIMPULAN

Manajemen keuangan di MTs Al-Jawahir Sampang merupakan sebuah model integrasi yang harmonis antara sistem tata kelola administratif formal-modern (regulasi Dana BOS pemerintah) dengan sistem nilai teologis-kultural-tradisional (karakteristik kepesantrenan). Strategi pembiayaan madrasah ini dijalankan secara konsisten di atas empat tahapan manajerial, yaitu perencanaan yang berorientasi pada skala prioritas mutu pembelajaran, pelaksanaan alokasi dana yang efisien, sistem pengawasan berlapis yang melibatkan pengawasan formal kepala madrasah dan pengawasan spiritual dewan pengasuh kiai, serta pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel kepada instansi Kementerian Agama maupun kepada para wali murid.

Legitimasi historis yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Asy'ari Komis yang telah berdiri kokoh sejak tahun 1835 terbukti menjadi modal sosial dan modal spiritual yang sangat kuat dalam membangun prinsip *amanah* serta menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat (*public trust*) secara lintas generasi. Meskipun madrasah ini masih memiliki keterbatasan teknis dalam mengadopsi transparansi digital berbasis teknologi penuh di wilayah rural, kelemahan tersebut berhasil disubstitusi melalui forum komunikasi tatap muka langsung yang transparan serta optimalisasi pemanfaatan instrumen pendanaan alternatif seperti dana wakaf lahan dan dana zakat subsidi silang. Pola manajemen pembiayaan integratif ini terbukti efektif menopang

keberlanjutan mutu operasional madrasah dalam mencetak generasi santri yang tidak hanya unggul secara keilmuan umum, melainkan juga memiliki keluhuran akhlakul karimah.

REFERENSI

Ahmad Fauzi. (2021). "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1.

Arwildayanto. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Tulungagung: IAIN TA Press.

Ayiek Evrytanadha & Dwi Erma. (2024). "Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.

Data Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Profil Satuan Pendidikan: MTs Al-Jawahir Sampang (NPSN: 20583215)*.

E. Mulyasa. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jejen Musfah. (2018). *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Ken Aryana. (2021). "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1.

Lulud Wijayanti. (2024). "Transparansi Pengelolaan Zakat dan Wakaf: Perspektif Good Governance Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2.

Matin. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Concept dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mujamil Qomar. (2015). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.

Prisillia Mutiara Sari & Sunhaji. (2026). "Integrasi Nilai Amanah, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam Manajemen Keuangan Pendidikan Islam di Era Digital." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 11, No. 2.

Siti Nurhayati. (2020). "Manajemen Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah." *Jurnal Adminstrasi Pendidikan*, Vol. 27, No. 2.

Sri Minarti. (2016). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sylla Indah Ning Rahayu & Siska Yulia Weny. (2026). "Implementasi Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 5, No. 1.

Syaiful Sagala. (2017). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.